

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai pemimpin maka tidak lepas pembahasan mengenai kualitas sumber daya dari manusia itu sendiri. Kualitas dari seorang pemimpin sangat diperlukan dikarenakan hal ini berpengaruh terhadap bagaimana seorang pemimpin dalam menjalani tugas dan wewenangnya untuk mencapai sebuah tujuannya. Seorang pemimpin dikatakan berhasil jika mampu memaksimalkan kekuasaannya dalam mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas dari lembaga dan instansi yang dipimpin. Kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap jalannya sebuah lembaga atau instansi dalam mencapai kesuksesan. Kepemimpinan merupakan faktor penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan dari suatu lembaga atau instansi. Kepemimpinan merupakan hubungan yang saling mempengaruhi antara pemimpin dan bawahannya dengan tujuan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersama. Melalui semangat reformasi Indonesia hari ini telah menerapkan konsep yang dinamakan desentralisasi. Desentralisasi secara bahasa adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Siswanto Sunarno, 2014:6)

Dapat dipahami bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain melalui komunikasi dua arah secara baik agar dapat menggerakkan orang untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin merupakan contoh bagi anggotanya dalam bertindak dan bersikap sehingga sudah selayaknya pemimpin memperlihatkan contoh yang baik kepada anggota melalui jiwa kepemimpinannya. Pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang dapat memberikan pengaruh positif kepada bawahannya yang berdampak kepada peningkatan kualitas dari lembaga tersebut. Seorang pemimpin yang baik sudah seharusnya mempunyai karakter atau gaya kepemimpinann sebagai landasan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya yang dilakukan seorang pemimpin dalam mengembangkan daerah atau wilayah yang dipimpinnya tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang di gunakan oleh pemimpin tersebut.

Suatu Birokrasi dalam mencapai tujuan dan memperoleh keberhasilan juga ditentukan oleh kepemimpinan seorang pemimpin, begitu juga dengan kepemimpinan suatu daerah. Fungsi kepemimpinan dalam suatu Birokrasi sangat urgent dalam rangka pencapaian tujuan dalam tata kelola pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan yang terjadi pada birokrasi tergantung dari gaya kepemimpinan seorang pemimpin tersebut yang memiliki wewenang penuh dalam sebuah pemerintahan. Gaya kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting penentu keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin dengan menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya agar bekerja sesuai arahnya untuk mencapai tujuan

bersama. Secara sederhana gaya kepemimpinan itu merupakan gambaran sikap, perilaku dan cara berpikir seseorang dalam memimpin dan mempengaruhi orang lain. Dalam memimpin setiap pemimpin memiliki karakter atau gaya kepemimpinannya sendiri dalam memimpin baik itu instansi, lembaga ataupun pemerintahan. Gaya pemimpin tersebut yang akan mempengaruhi bagaimana jalannya instansi atau lembaga tersebut yang berdampak kepada kualitasnya. Gaya kepemimpinan juga berdampak kepada kinerja dari anggota atau bawahannya dalam menjalankan tugasnya. Perlu adanya interaksi dan koordinasi antara pimpinan dan bawahan dalam mengatur jalannya sebuah birokrasi. Terdapat beberapa macam gaya kepemimpinan seperti kepemimpinan otokratis, partisipatif, birokrasi, delegatif, transaksional dan kharismatik. Presiden, Gubernur, Walikota atau Bupati merupakan contoh pemimpin yang ada di negara Indonesia.

Berbicara mengenai kepemimpinan seperti Gubernur, Bupati, Walikota tentunya itu merupakan bentuk kepemimpinan dalam suatu daerah atau biasa dikenal dengan Pemerintah daerah dalam ranah Eksekutif. Pemerintah daerah terlahir dikarenakan dalam konsep pemerintahan Demokrasi terdapat yang namanya Desentralisasi atau pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada kepala daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengurus segala mekanisme tentang penyelenggaraan pemerintahnya sendiri dan tetap mentaati dan mengikuti UUD RI 1945 dalam penyelenggaraannya. Idealnya dengan adanya Desentralisasi akan mendapatkan beberapa dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, seperti teori *Decentralization in theory* yang menyebutkan tentang konsep ideal Desentralisasi menurut Smith, BC dalam (Muluk, 2009:5), bahwa

desentralisasi memberikan kontribusi positif bagi perkembangan demokrasi nasional karena *local government* itu mampu menjadi sarana bagi pendidikan politik rakyat, dan memberikan semacam pelatihan bagi kepemimpinan politik, serta mendukung pencapaian stabilitas politik bagi pemerintahan. Lebih lanjut Hoessein juga menambahkan (Mulk,2009:5) bahwa dalam konsep otonomi daerah terkandung kebebasan untuk berprakarsa guna mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung oleh pemerintah pusat oleh karena itu ini sangat berkaitan erat dengan jalannya Demokrasi dalam suatu Negara.

Namun dalam praktiknya desentralisasi dalam pemerintahan suatu Negara termasuk juga di Indonesia masih banyak yang berjalan tidak sesuai dengan konsep desentralisasi secara teoritik. Banyak justru dengan adanya desentralisasi malah menimbulkan lahirnya para kaum Otoritarian baru di dalam pemerintahan daerah. Para kaum Otoritarian tersebut cenderung selalu menguatkan posisinya didalam pemerintahan dengan berbagai cara seperti berusaha melanjutkan pemerintahan yang telah ditinggalkan dengan menarik atau berusaha memasukan konsep kekerabatan untuk menduduki kursi pemerintahan baik di Eksekutif maupun di Legislatif. atau dapat dikenali dengan istilah umum membentuk sebuah Dinasti Politik.

Dinasti Politik merupakan suatu gambaran pemerintahan yang berisikan orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan didalam suatu pemerintahan. Terbentuknya suatu budaya Dinasti Politik di dalam sebuah pemerintahan tentunya menjadi pertanyaan besar dalam penyelenggaraan suatu Demokrasi. Demokrasi

memberikan keleluasaan bagi setiap orang untuk menjadi pemimpin dalam suatu kepemimpinan, bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama untuk berpotensi menjadi pemimpin di dalam suatu pemerintahan. Dan dengan adanya praktik Dinasti Politik tentu menimbulkan aspek negatif bagi rezim demokrasi. Setiap individu yang mungkin mempunyai kapasitas secara politik untuk menjadi calon pemimpin akan sulit untuk berkontestasi didalam perebutan kursi pemerintahan dikarenakan Hegemoni yang telah diberikan kepada lapisan-lapisan Masyarakat oleh para pelaku dinasti politik tersebut dengan segala kapasitas dan kekuasaannya tentu untuk melakukan hal tersebut bukan suatu kesulitan. Seperti dikatakan oleh Wasisto (2013:203) gejala yang mendasari terbentuknya dinasti politik ada dua hal. Pertama, macetnya proses kaderisasi di dalam partai politik sehingga partai politik tidak menjangkau calon-calon pemimpin baru yang berkualitas namun malah cenderung mengusung anak atau keturunan atau yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pemerintah sebelumnya. Kedua, Konteks masyarakat yang menjaga status quo di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga untuk meneruskan estafet kekuasaan.

Berbicara mengenai Dinasti Politik di ranah kepala daerah tentunya dapat dikaitkan juga dengan pemerintahan di Kota Banjar Jawa Barat. Wali Kota Banjar yang menjabat setelah Herman Sutrisno ialah Hj. Ade Uu Sukaesih, S.I.P M.Si. ia merupakan istri dari Wali Kota Banjar sebelumnya yaitu Herman Sutrisno. Uu Sukaesih menjabat sebagai Wali Kota Banjar selama 2 periode. Terhitung sejak tahun 2013-2018 di periode pertama kemudian menjabat kembali di periode

pemilihan kedua yaitu pada tahun 2018-2023. Dipimpin oleh Walikota yang sama selama 10 tahun tentunya merupakan periode waktu yang cukup lama. Tentunya beragam perubahan yang telah ia lakukan sehingga masyarakat mempercayakan masa depan kota Banjar kepadanya. Namun dalam realita di lapangan tentunya terdapat pro dan kontra mengenai beliau. Terutama di masyarakat banyak yang masih mengaggap bahwa beliau hanya menjadi tangan kanan Walikota sebelumnya yaitu suaminya sendiri Herman Sutrisno. Banyak masyarakat yang mengaggap bahwa ini merupakan dinasti politik yang di lakukan keluarga Herman Sutrisno terhadap pemerintahan di kota Banjar. Dengan fakta bahwa Kota Banjar di pimpin oleh pasangan suami istri selama 20 tahun ini merupakan bukan sebuah rahasia umum untuk menyebut bahwa ini merupakan sebuah Dinasti Politik dalam Pemerintahan Daerah. Ditambah dengan fakta bahwa Herman Sutrisno berhasil menduduki salah satu kursi di Legislatif yaitu sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode tahun 2019-2024 melalui fraksi Golkar. Ini menggambarkan bahwa kedua pasangan tersebut mengontrol Eksekutif dan Legislatif secara bersamaan. Namun Herman Sutrisno mundur dari jabatan keanggotaan Legislatif tersebut pada tahun 2022 setelah secara resmi di vonis bersalaholeh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung atas kasus “Dugaan suap proyek pekerjaan infrastruktur Dinas PUPR Kota Banjar yang terbukti menerima suap dan gratifikasi selama menjabat sebagai Walikota Banjar periode 2008-2013. Republika (2022) Ditambah dengan fakta sebelumnya terkait permasalahan yang sama yakni di tetapkan nya mantan Kepala Desa Balokang Kota Banjar oleh Kejaksaan Negeri

Kota Banjar atas dugaan Korupsi APBDes Desa Balokang yang diluncurkan pada tahun 2017. Pikiran Rakyat,(2019).

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hal tersebut para Elit di Desa Balokang baik itu Elit yang berada dalam struktur pemerintahan Desa Balokang ataupun Elit yang tidak berada dalam pemerintahan mengingat orang-orang tersebut lebih faham dan lebih konsern terhadap isu tersebut dan apa yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Balokang. jadi penulis memilih sasaran penelitian terhadap Elit Desa Balokang karna harus menggali informasi lebih dalam tentang fenomena yang terjadi tersebut. dengan berbagai fakta pahit yang terjadi di Kota Banjar dan Desa Balokang itu maka penulis memilih Desa Balokang sebagai lokasi penelitian yang layak untuk di jadikan sebagai objek penelitian penulis.

B. Rumusan Masalah

Dengan segala deskripsi yang penulis sajikan dalam latar belakang tersebut maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana persepsi elit Desa Balokang terhadap gaya kepemimpinan sosok Uu Sukaesih sebagai Wali Kota Banjar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi elit di Desa Balokang terhadap gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh wali kota Banjar Uu Sukaesih.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan serta wawasan kepada kalangan para akademis tentang gaya kepemimpinan seorang kepala daerah serta persepsi yang di timbulkan nya dan menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya dalam pustakailmu pengetahuan guna menjadikannya sebagai acuan dalam penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, saran dan gambaran di kalangan elit lokal tentang bagaimana masyarakat memandang sosok pemimpinnya.